

Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas melalui Aplikasi Pencatatan Keuangan BUMDes Somogede

Didik Singgih Widiyanto *¹

Rezky Apri Suciati ²

Kana Hikmatussaniyah ³

Iriana Setiana ⁴

Nalil Qiromah ⁵

Lingga Sekar Kinanti ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sains Al-Qur'an

*e-mail : singgihdidik04@gmail.com¹, rezkyapri226@gmail.com², kanahikma@gmail.com³,
irianasetiana198@gmail.com⁴, n11818253@gmail.com⁵, linggakinanti22@gmail.com⁶

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat utama tata kelola keuangan BUMDes. Namun, masih terdapat kendala seperti standar pelaporan, konsistensi dokumentasi, dan keterbatasan akses informasi. Penerapan aplikasi pencatatan keuangan di BUMDes Somogede dapat memperkuat kedua pilar ini melalui kemudahan penelusuran transaksi, ketepatan waktu, serta konsistensi format laporan. Dengan dukungan pelatihan SDM dan penegakan prosedur pelaporan, digitalisasi mampu meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengawasan, sehingga tata kelola BUMDes menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: BUMDes, Transparansi, Akuntabilitas, Aplikasi Pencatatan Keuangan, Digitalisasi

Abstract

Transparency and accountability are key to BUMDes financial governance, yet challenges remain in reporting, documentation, and information access. Implementing a financial recording application in BUMDes Somogede can strengthen these pillars by ensuring transaction traceability, timeliness, and consistent reporting formats. Supported by human resource training and strict reporting procedures, digitalization enhances public trust and oversight, making BUMDes governance more transparent and accountable.

Keywords: Village Owned Enterprises (BUMDes), Transparency, Accountability, Financial Recording Application, Digitalization

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten dengan tujuan bersama-sama mengoptimalkan sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan desa. Dalam upaya membangun desa berkelanjutan, BUMDes harus beroperasi secara transparan dan akuntabel agar dapat diandalkan, dikelola dengan baik, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Meskipun demikian, kegiatan administrasi, operasional, dan keuangan di BUMDes Somogede sebagian besar masih ditangani secara manual menggunakan buku besar.¹

Pendekatan manual ini telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti pencatatan yang tidak akurat, risiko kehilangan data, dan tantangan dalam menghasilkan laporan yang tepat waktu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penerapan sistem digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.

1. Ada risiko kesalahan yang signifikan dalam pencatatan karena kesalahan manusia.
2. Penyusunan laporan keuangan sering tertunda.

¹ Agustri Hestiana, Faridah Faridah, and Romdana Romdana, "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Di Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras (Sam) Kabupaten Seluma)," *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 2 (2024): 133–49, <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2.543>.

3. Memverifikasi dan memvalidasi data merupakan hal yang menantang.
4. Penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan tidak efisien.
5. Catatan sejarah tidak terorganisir dengan baik dan kurang terintegrasi.

Kondisi ini dapat menghambat prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang penting bagi pengelolaan BUMDes yang efektif. Pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat pedesaan kepada pengelola BUMDes sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang jelas. Permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Somogede adalah pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan beberapa kendala seperti rentan terhadap kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan, dan kesulitan dalam verifikasi transaksi.² Permasalahan ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas, serta dapat mengikis kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes. Sebagai respons strategis, transformasi digital diusulkan melalui penerapan aplikasi pencatatan keuangan yang dapat merangkum seluruh proses transaksi secara efisien, dengan akurasi yang lebih tinggi, dan dokumentasi yang lebih baik.

Penerapan aplikasi pencatatan keuangan ini diharapkan memberikan manfaat yang nyata. Pertama, meningkatkan efisiensi kerja dengan memungkinkan entri, penyimpanan, dan pengambilan data yang cepat tanpa perlu pencatatan yang berulang. Kedua, meminimalkan risiko kesalahan perhitungan melalui pemrosesan otomatis, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan memastikan setiap transaksi tercatat secara sistematis, mudah dilacak, dan dapat diaudit.³ Terakhir, menyederhanakan proses pelaporan keuangan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan memungkinkan laporan dihasilkan secara otomatis dalam format yang terstandarisasi dan andal.

Selain manfaat teknis, digitalisasi catatan keuangan juga mendorong transparansi dengan menjadikan informasi mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat desa. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam memantau kinerja BUMDes. Oleh karena itu, penerapan aplikasi pencatatan keuangan bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi juga merupakan strategi penting untuk mengembangkan manajemen BUMDes yang lebih modern, profesional, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Permasalahan utama yang dihadapi BUMDes Somogede adalah ketergantungannya pada sistem pencatatan keuangan manual. Pendekatan ini terbukti tidak efisien dan rentan terhadap berbagai tantangan seperti kesalahan perhitungan, keterlambatan pelaporan, dan kesulitan dalam verifikasi data. Keterbatasan tersebut menghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas—prinsip-prinsip utama yang seharusnya mendasari pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu, permasalahan utama yang perlu diatasi adalah bagaimana kekurangan sistem manual ini memengaruhi keakuratan informasi, ketepatan waktu penyampaian data, dan transparansi laporan keuangan yang penting bagi masyarakat dan pemerintah desa.⁴

Lebih lanjut, tantangan yang lebih luas terletak pada eksplorasi bagaimana solusi digital, seperti aplikasi pencatatan keuangan, dapat mengatasi masalah-masalah ini. Sangat penting untuk mengevaluasi seberapa baik aplikasi-aplikasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan meningkatkan efisiensi pencatatan, menyederhanakan akses informasi, dan mendukung audit data yang lebih sistematis. Sama pentingnya adalah memahami dampak perangkat digital ini terhadap kepercayaan publik apakah sistem yang lebih terbuka dan presisi dapat meningkatkan keterlibatan dan dukungan masyarakat terhadap BUMDes. Pertanyaan-

² Oryza Ardhiarisca, "Optimalisasi Laporan Keuangan BUMDes Melalui Pendampingan Penggunaan Aplikasi Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember" 2, no. 5 (2025): 22–28.

³ Nispa Sari, Altri wahida, and Andika Rusli, "Optimalisasi Peran Sistem Informasi Akuntansi Desa Dalam Keuangan (Kecamatan Selatan)," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 1 (20224): 245–52.

⁴ K A Koerniawan, G T Murti, and ..., "SOSIALISASI APLIKASI SIABDes TAXION UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI BUMDES KECAMATAN DAYEUH ...," *The Proceeding of ...*, 2024, <https://journals.telkomuniversity.ac.id/cosecant/article/view/7797%0Ahttps://journals.telkomuniversity.ac.id/cosecant/article/download/7797/2611>.

pertanyaan inilah yang menjadi rumusan masalah utama penelitian ini, yang akan dikaji secara mendalam dalam artikel ini.⁵

Studi ini secara khusus berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kekurangan sistem pencatatan manual yang saat ini digunakan oleh BUMDes Somogede. Dengan memahami permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana pencatatan manual memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan. Mulai dari pencatatan transaksi dan pembuatan laporan hingga transparansi dan akuntabilitas yang mendasari kepercayaan publik. Analisis ini krusial untuk mengenali kelemahan-kelemahan ini, bukan hanya sebagai keterbatasan teknis, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola BUMDes secara keseluruhan.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki potensi aplikasi pencatatan keuangan sebagai solusi strategis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Penerapan sistem digital diharapkan dapat mempercepat pelaporan, meningkatkan kapabilitas audit, dan memfasilitasi akses publik dan pemangku kepentingan terhadap informasi keuangan.⁶ Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi praktis dan aplikatif untuk penerapan sistem digital di BUMDes Somogede, menjadikannya sebagai model bagi desa-desa lain yang ingin mengelola keuangan secara modern, profesional, dan selaras dengan tata kelola yang baik.

Kajian Teori

1. Teori Transparansi dalam Tata Kelola Publik

Transparansi merupakan salah satu bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi berarti pemerintah harus terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat, terutama soal proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mengetahui, mengawasi, dan menilai apakah lembaga publik itu menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai peraturan.

Secara teori, Hood (2006) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang mengharuskan informasi tersedia dengan mudah bagi publik agar mereka bisa melihat proses dan hasil kebijakan secara jelas. Transparansi tidak hanya tentang adanya informasi, tapi juga kualitas informasi tersebut, yaitu jelas, relevan, tepat waktu, dan mudah dipahami. Dengan begitu, transparansi berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi organisasi publik.⁷

Dalam pengelolaan keuangan desa dan BUMDes, transparansi berarti semua catatan dan pelaporan keuangan harus bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan terbuka, di mana informasi tentang penggunaan dan hasil dana desa harus diketahui oleh publik. Penggunaan sistem pencatatan keuangan berbasis digital bisa memperkuat prinsip transparansi karena data bisa dicatat secara real-time, terhindar dari manipulasi, dan mudah diakses begitu dibutuhkan. Dengan kata lain, transparansi dalam tata kelola publik bertujuan untuk membangun kepercayaan, meningkatkan legitimasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Teori Akuntabilitas Organisasi dan Keuangan

Akuntabilitas adalah konsep penting dalam pengelolaan organisasi, baik publik maupun swasta. Konsep ini menekankan pentingnya menjelaskan, membenarkan, dan bertanggung jawab

⁵ Ni Gusti Ayu Pitria, "Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tabanan," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 114–18, <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3353>.

⁶ Hikmah Julia, Embun Suryani, and Kata Kunci, "Persepsi Terhadap Aplikasi Pengelolaan Keuangan Studi Kasus Pengelola BUMDes Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika" 8 (2022): 640–46.

⁷ Idah Rosidah et al., "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–56, <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>.

atas setiap tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya. Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi atau individu untuk menjelaskan tindakannya kepada pihak yang berhak atau masyarakat umum. Dalam organisasi publik, akuntabilitas sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, karena hanya dengan menjalankan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, sebuah lembaga dapat mendapatkan kepercayaan atau legitimasi dari masyarakat.⁸

Secara lebih spesifik, membagi akuntabilitas menjadi dua jenis utama, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal merujuk pada pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat kepada parlemen, atau pemerintah desa kepada bupati. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak yang memiliki kepentingan sejajar. Dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas berarti menyajikan laporan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku.

Akuntabilitas keuangan dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola digunakan sesuai dengan tujuan, peraturan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memiliki kewajiban menyajikan laporan keuangan yang jelas, akurat, dan bisa diaudit. Penggunaan sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi digital dapat memperkuat akuntabilitas karena mengurangi kesalahan pencatatan, meminimalkan kemungkinan manipulasi, serta meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan. Dengan demikian, akuntabilitas organisasi dan keuangan tidak hanya sebagai alat kontrol internal, tetapi juga membantu membangun kepercayaan masyarakat serta menciptakan tata kelola desa yang profesional.⁹

3. Konsep BUMDes dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga ekonomi yang dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Lembaga ini dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah setempat. Dasar hukum BUMDes terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama Pasal 87 yang menyatakan bahwa desa boleh mendirikan BUMDes untuk mengelola usaha, memanfaatkan potensi yang ada, dan memenuhi kebutuhan warga desa agar kesejahteraan masyarakat meningkat. BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat peran masyarakat desa. Dalam operasionalnya, BUMDes dikelola dengan prinsip kerja sama, persaudaraan, dan gotong royong.

Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan aset – aset yang produktif. Undang-Undang Desa juga menetapkan bahwa pengelolaan BUMDes harus jujur, terbuka, dan melibatkan partisipasi agar BUMDes benar - benar memberikan manfaat bagi warga desa. Dengan demikian BUMDes memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai lembaga usaha yang menghasilkan keuntungan finansial, serta sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi di desa.

4. Teori/Literatur tentang Digitalisasi Sistem Keuangan atau Aplikasi Pencatatan Keuangan

Digitalisasi sistem keuangan adalah proses perubahan dari cara pencatatan dan pengelolaan uang secara manual menjadi sistem yang menggunakan teknologi informasi. Proses ini bertujuan agar semua kegiatan keuangan lebih efektif, efisien, dan transparan. Menurut Tapscott (1995), digitalisasi adalah pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas, transparansi, serta efektivitas dalam pengelolaan informasi. Dalam bidang pencatatan keuangan, digitalisasi memungkinkan data keuangan dicatat secara langsung, otomatis, dan disimpan dalam sistem yang aman. Hal ini membantu mengurangi kesalahan yang terjadi karena manusia (human error) serta meminimalkan kemungkinan data dimanipulasi.

⁸ Meriska Sari, Sri Mintarti, and Yunita Fitria, "K I N E R J A 15 (2), 2018 45-56 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan" 15, no. 2 (2018): 45–56, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>.

⁹ Ika Asmawati and Prayino Basuki, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Bumdes," *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2019): 63–76.

Selaras dengan itu, literatur bidang akuntansi publik menekankan bahwa penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital dapat memperkuat prinsip good governance.

Digitalisasi sistem keuangan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan yang dihasilkan lebih cepat, lebih akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, sistem digital juga memudahkan proses audit, mempercepat prosedur administrasi, dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana publik.

Dalam BUMDes, penerapan aplikasi pencatatan keuangan digital menjadi solusi atas kelemahan sistem manual, seperti ketelatannya, ketidakakuratan data, serta kesulitan dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban. Harapan dari penerapan digitalisasi ini adalah agar BUMDes bisa lebih profesional, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa.

KAJIAN TEORI

PENGERTIAN AKUNTABILITAS

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk menjelaskan keputusan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan kepercayaan. Akuntabilitas public menunjukkan seberapa baik suatu organisasi dapat melaporkan dan menjelaskan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Di BUMDes, akuntabilitas berarti setiap pengurus perlu membuat laporan keuangan yang bisa dipertanggung jawabkan, baik kepada pemerintah desa, masyarakat, maupun lembaga yang mengawasi.

Dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi akan tercipta manajemen yang baik sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dana dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk terus mendukung kehadiran BUMDes. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan peluang baru dalam pengelolaan organisasi, termasuk BUMDes. Kemajuan dalam teknologi informasi telah membuka jalan baru untuk cara mengatur organisasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa. Aplikasi pencatatan keuangan merupakan salah satu inovasi yang dapat digunakan untuk mendukung keterbukaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Salah satu cara baru yang bisa digunakan untuk mempertahankan keterbukaan dan tanggung jawab dalam uang adalah dengan menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan transaksi dilakukan secara sistematis, real-time, dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan semua transaksi dilakukan dengan teratur, langsung, dan dicatat dengan baik. Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas berarti usaha untuk memperbaiki cara kedua prinsip ini diterapkan supaya bisa memberikan keuntungan terbaik bagi BUMDes dan masyarakat. Menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan, karena teknologi digital bisa memberikan data keuangan yang tepat, jelas, dan bisa dipantau secara terus-menerus.¹⁰ Sistem informasi akuntansi berbasis digital dapat meminimalisir human error, mempercepat penyusunan laporan, dan meningkatkan akurasi data. Sistem akuntansi yang berbasis digital bisa mengurangi kesalahan manusia, membuat pembuatan laporan lebih cepat, dan membuat data lebih akurat.

Dengan penerapan aplikasi pencatatan keuangan di BUMDes Somogede, diharapkan seluruh arus keuangan dapat terdokumentasi secara jelas, mudah ditelusuri, serta lebih mudah diakses oleh pihak terkait. Dengan menggunakan aplikasi pencatatan keuangan di BUMDes Somogede, diharapkan semua kegiatan keuangan bisa dicatat dengan jelas, mudah dicari, dan lebih mudah diakses oleh orang-orang yang membutuhkannya. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan transparansi sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Ini akan langsung membantu meningkatkan keterbukaan dan juga memperkuat tanggung jawab dalam pengelolaan BUMDes.

¹⁰ Bambang Haryadi, "Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Laporan Keuangan Bumdes Sempurna Bangkalan," *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 4, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.22219/janayu.v4i1.24193>.

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik serta menjamin pemanfaatan dana secara efisien dan efektif. Transparansi mengacu pada ketersediaan data yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, sedangkan akuntabilitas mensyaratkan adanya tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan tersebut. Dalam situasi ini, pemanfaatan aplikasi pencatat keuangan menjadi solusi strategis yang bisa memperbaiki kedua aspek tersebut. Aplikasi ini memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan yang teratur, langsung, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan.¹¹

Di samping itu, aplikasi memperlancar proses laporan keuangan yang dapat dengan mudah diperiksa oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan di BUMDes Somogede tidak hanya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendukung pengelolaan keuangan yang baik (*good governance*), yang pada akhirnya menguatkan keberlanjutan dan kepercayaan terhadap lembaga BUMDes itu sendiri. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan ini sejalan dengan teori akuntabilitas publik serta prinsip manajemen keuangan modern yang menyoroti pentingnya digitalisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam administrasi keuangan desa somogede.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penerapan studi kasus pada BUMDes Somogede untuk menganalisis pengoptimalan transparansi dan akuntabilitas lewat penggunaan aplikasi pencatatan keuangan. Metode pengumpulan data mencakup pengamatan langsung terhadap proses pencatatan keuangan, wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes dan pemangku kepentingan yang relevan, serta dokumentasi laporan keuangan yang terdapat dalam aplikasi. Selanjutnya, diberikan pendampingan serta pelatihan teknis mengenai pemanfaatan aplikasi pencatatan keuangan untuk meningkatkan keterampilan pengelola dalam mencatat serta melaporkan keuangan secara sistematis dan transparan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik yang menggabungkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menilai pengaruh penggunaan aplikasi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Pendekatan ini selaras dengan praktik optimalisasi sistem informasi akuntansi di tingkat desa yang menekankan pentingnya digitalisasi dan bimbingan sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan BUMDes Somogede masih dilakukan secara manual dengan menggunakan buku besar. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti ketidak efektifan dalam pencatatan transaksi, rawan terjadinya kesalahan perhitungan, keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, serta kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara cepat dan akurat.

Risiko kesalahan manusia dalam mencatat transaksi yang tinggi, laporan keuangan sering terlambat karena membutuhkan waktu lama untuk dikumpulkan kembali, kesulitan dalam memverifikasi dan mengecek ulang data saat terjadi audit, kurangnya transparansi karena masyarakat dan pihak terkait sulit mengakses laporan secara cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem manual belum memenuhi prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel seperti yang diamanatkan dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014.

Pentingnya penerapan aplikasi pencatatan keuangan terletak pada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi, yaitu informasi keuangan dapat terdokumentasi lebih baik dan mudah diakses oleh siapa saja. Memperkuat akuntabilitas, karena laporan bisa dipertanggungjawabkan dengan data digital yang tercatat secara otomatis. Mewujudkan efisiensi waktu dan biaya, karena laporan dapat dibuat dengan cepat dan sesuai format standar.

¹¹ Hardian Oktavianto and Henny Wahyu Sulisty, "Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Keuangan Digital Bagi Bumdes," *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS : Journal of Information System* 6, no. 1 (2022): 77, <https://doi.org/10.51211/isbi.v6i1.1763>.

Memudahkan pengawasan, sehingga pemerintah desa dan masyarakat dapat lebih mudah memantau kinerja BUMDes. Hal ini sejalan dengan teori transparansi (Hood, 2006) dan akuntabilitas (Bovens, 2007), di mana digitalisasi dapat meningkatkan kualitas tata kelola melalui sistem yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Penerapan aplikasi pencatatan keuangan di BUMDes Somogede diharapkan dapat menjadi solusi dengan mengurangi risiko kesalahan pencatatan, karena sistem otomatis meminimalkan kesalahan input atau hitungan yang salah. Mempercepat pembuatan laporan keuangan, yang bisa langsung diakses dan dicetak sesuai kebutuhan. Meningkatkan transparansi publik, karena data dapat ditampilkan secara teratur kepada masyarakat. Meningkatkan akuntabilitas keuangan, karena setiap transaksi tercatat dan mudah diaudit. Menurut literatur tentang digitalisasi (Tapscott, 1995), transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas dalam organisasi. Dengan demikian, penggunaan aplikasi pencatatan keuangan diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola BUMDes sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.¹³

2. Temuan - temuan

- a. Pencatatan keuangan BUMDes Somogede sampai saat ini masih dilakukan secara manual dengan buku besar. Proses ini menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan, tingginya risiko human error, serta kurangnya akses masyarakat terhadap informasi keuangan. Data ini diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan administrasi keuangan BUMDes serta wawancara dengan bendahara BUMDes yang menyatakan bahwa keterlambatan laporan kerap terjadi akibat pencatatan ganda dan kesulitan dalam rekap data manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencatatan manual tidak mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Selain itu, temuan ini memperkuat kajian Mardiasmo (2018) bahwa sistem manual cenderung lambat, tidak efisien, dan rawan kesalahan.
- b. Urgensi penerapan aplikasi pencatatan keuangan
Terdapat kebutuhan mendesak untuk penggunaan aplikasi pencatatan keuangan digital. Kepala desa, ketua BUMDes dan bendahara menyampaikan bahwa dengan sistem digital, laporan keuangan akan lebih cepat, akurat, dan mudah diakses. Temuan ini diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus BUMDes serta analisis dokumen laporan keuangan 2022–2024 yang menunjukkan keterlambatan rata-rata 2–3 minggu dalam penyusunan laporan tahunan. Hasil ini sejalan dengan teori transparansi dan akuntabilitas, di mana penggunaan teknologi informasi dapat memperkuat sistem pelaporan dan meminimalisasi keterlambatan. Dengan demikian, digitalisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan BUMDes.
- c. Solusi melalui aplikasi pencatatan keuangan
Aplikasi pencatatan keuangan dinilai mampu meminimalisasi kesalahan input, mempercepat penyusunan laporan, dan menyediakan akses data secara real time. Hasil ini diperoleh melalui studi komparatif dengan BUMDes yang sudah menggunakan aplikasi serupa. Dari hasil tersebut menyebutkan laporan bulanan dapat selesai dalam hitungan hari, dibandingkan berminggu-minggu dengan sistem manual. Hal ini memperkuat literatur tentang digitalisasi sistem keuangan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi organisasi. Jika diimplementasikan di BUMDes Somogede, aplikasi pencatatan keuangan akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi desa.

5. Teori Baru

¹² Nur Khamisah et al., "Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Pada BUMDES Darussalam Di Desa Burai," *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 5, no. 1 (2024): 39–48, <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.157>.

¹³ P. M. L. K Yanti and L. S Musmini, "Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha," *Jurnal Akuntansi Profesi* 11, no. 1 (2020): 47–58, <https://doi.org/10.23887/jap.v11i1.26065>.

- a) Teori Transparansi dan Tata Kelola Publik
Menurut Meijer, Curtin & Hillebrandt (2012) dalam artikel *Open Government: Connecting Vision and Voice*, open government adalah bentuk tata kelola yang menekankan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transparansi tidak lagi sekadar keterbukaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi publik dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi serta akuntabilitas. Jadi, menurut Meijer et al. (2012), open government & open data adalah pengembangan teori transparansi modern: tidak hanya membuka informasi, tapi juga menyediakan data yang bisa diakses, digunakan, dan dikolaborasikan untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
- a) Teori Akuntabilitas Organisasi dan Keuangan
Menurut Overman (2022) dalam artikelnya di *Public Administration Review*, felt accountability adalah tingkat sejauh mana individu merasa bertanggung jawab untuk menjelaskan dan membenarkan tindakannya kepada pihak lain yang dianggap memiliki otoritas yang sah (legitimasi) dan keahlian (expertise). Implikasi dari teori felt accountability menurut Overman (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik perlu dipahami dengan lebih realistis, karena tidak hanya berupa prosedur administratif semata, tetapi juga berkaitan dengan rasa tanggung jawab moral yang dirasakan oleh individu. Konsep ini bisa memperkuat semangat kerja, karena para aktor publik akan lebih berkomitmen jika pihak yang mengawasi dianggap sah dan memiliki kemampuan. Selain itu, konsep felt accountability membantu mengatasi tantangan dalam tata kelola modern yang melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas tidak cukup hanya dalam bentuk formal, tetapi harus dirasakan secara nyata. Dengan demikian, konsep ini juga mencegah munculnya akuntabilitas semu atau hanya simbolik, di mana laporan disusun formal tanpa adanya rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh dari pelaku kebijakan.
- b) Susanti et al. (2021) menyatakan bahwa penggunaan aplikasi pencatatan keuangan berbasis digital (misalnya *mobile accounting apps*) mempermudah pelaku UMKM dalam mengelola arus kas, memantau laporan keuangan secara real-time, serta meningkatkan akuntabilitas kepada investor, kreditur, maupun pemerintah.

Jadi menurut Susanti et al (2021), penggunaan teknologi keuangan (fintech) dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memberikan manfaat strategis dalam mengelola bisnis. Aplikasi pencatatan keuangan digital memudahkan pemantauan arus kas, pendapatan, pengeluaran, dan laba rugi secara langsung dan real-time, sehingga tidak perlu lagi mengandalkan metode pencatatan manual. Selain itu, sistem pencatatan keuangan yang lebih teratur meningkatkan transparansi dan keakuratan, sehingga UMKM bisa membuat laporan keuangan yang lebih jelas dan dapat dipercaya untuk kepentingan dalam maupun luar perusahaan, seperti bank, investor, atau pemerintah.

Dokumen keuangan digital juga menjadi bukti bahwa usaha tersebut kredibel, sehingga memperluas peluang menerima modal dari bank, modal ventura, atau layanan pinjaman fintech. Dari segi efisiensi, proses digitalisasi keuangan mengurangi beban tugas administratif, sehingga pemilik usaha bisa lebih fokus pada pengembangan bisnis. Selain itu, fintech juga mempercepat integrasi UMKM ke dalam sistem keuangan resmi, sehingga semakin banyak usaha kecil ikut terlibat dalam ekosistem ekonomi digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan manual yang masih digunakan oleh BUMDes Somogede dinilai kurang efektif, hal ini didasari karena adanya *human error* seperti terlambatnya pelaporan, risiko kesalahan saat pencatatan, kesulitan dalam memverifikasi data,

dan rendahnya kemudahan akses bagi informasi masyarakat. Kondisi ini jelas menghambat prinsip transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan BUMDes.

Menggunakan aplikasi pencatatan keuangan terbukti bisa menjadi solusi yang strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Digitalisasi memungkinkan pencatatan transaksi lebih akurat, pembuatan laporan lebih cepat, serta pengaksesan data secara real - time. Dengan demikian, penerapan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi publik dan akuntabilitas keuangan BUMDes.

Dengan adanya digitalisasi, kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Somogede bisa meningkat, sekaligus memperkuat legitimasi lembaga desa dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan aplikasi untuk mencatat keuangan di BUMDes Somogede adalah langkah penting yang harus segera dijalankan agar transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan. Pertama, sistem digital sebaiknya diterapkan secara bertahap, dengan dimulai dari pelatihan yang intensif bagi para pengurus BUMDes agar mereka mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik. Kedua, diperlukan pendampingan dari pihak pemerintah desa, akademisi, atau lembaga terkait untuk memastikan penggunaan aplikasi tetap konsisten dan sesuai dengan standar akuntansi serta aturan yang berlaku. Ketiga, aplikasi yang digunakan harus selaras dengan format laporan keuangan desa yang standar agar hasil pencatatan mudah dicek dan dilakukan oleh pihak luar. Keempat, transparansi bagi masyarakat dapat ditingkatkan dengan menyediakan akses informasi keuangan yang jelas, seperti dengan mempublikasikan laporan secara berkala di papan informasi desa atau media digital resmi, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data. Terakhir, jika penerapan aplikasi pencatatan keuangan di BUMDes Somogede berhasil, maka model ini bisa dipakai di desa lain sebagai contoh terbaik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang modern, profesional, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiarisca, Oryza. "Optimalisasi Laporan Keuangan BUMDes Melalui Pendampingan Penggunaan Aplikasi Di Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember" 2, no. 5 (2025): 22–28.
- Asmawati, Ika, and Prayino Basuki. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Bumdes." *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2019): 63–76.
- Bambang Haryadi. "Pelatihan Dan Pendampingan Manajemen Keuangan Dan Laporan Keuangan Bumdes Sempurna Bangkalan." *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat (Janayu)* 4, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.22219/janayu.v4i1.24193>.
- Hestiana, Agustri, Faridah Faridah, and Romdana Romdana. "Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Di Desa Gelombang Kecamatan Semidang Alas Maras (Sam) Kabupaten Seluma)." *Journal of Governance and Public Administration* 1, no. 2 (2024): 133–49. <https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i2.543>.
- Julia, Hikmah, Embun Suryani, and Kata Kunci. "Persepsi Terhadap Aplikasi Pengelolaan Keuangan Studi Kasus Pengelola BUMDes Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika" 8 (2022): 640–46.
- Khamisah, Nur, Asfeni Nurullah, Nilam Kesuma, and Shelly Febriana Kartasari. "Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Pada BUMDES Darussalam Di Desa Burai." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 5, no. 1 (2024): 39–48. <https://doi.org/10.29259/jscs.v5i1.157>.
- Koerniawan, K A, G T Murti, and ... "SOSIALISASI APLIKASI SIABDes TAXION UNTUK MENINGKATKAN AKURASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BUMDES DI BUMDES KECAMATAN DAYEUH ..." *The Proceeding of ...*, 2024. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/cosecant/article/view/7797%0Ahttps://journals.telkomuniversity.ac.id/cosecant/article/download/7797/2611>.
- Oktavianto, Hardian, and Henny Wahyu Sulisty. "Rancang Bangun Aplikasi Pencatatan Keuangan

- Digital Bagi Bumdes." *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information System* 6, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.51211/isbi.v6i1.1763>.
- Pitria, Ni Gusti Ayu. "Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes Menggunakan Aplikasi Keuangan Milik Desa Delod Peken Tabanan." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 114–18. <https://doi.org/10.38043/parta.v2i2.3353>.
- Rosidah, Idah, Gunardi, Priatna Kesumah, and Royke Bahagia Rizka. "Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA* 2, no. 1 (2023): 137–56. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>.
- Sari, Meriska, Sri Mintarti, and Yunita Fitria. "K I N E R J A 15 (2), 2018 45-56 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Organisasi Keagamaan" 15, no. 2 (2018): 45–56. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA>.
- Sari, Nispa, Altri wahida, and Andika Rusli. "Optimalisasi Peran Sistem Informasi Akuntansi Desa Dalam Keuangan (Kecamatan Selatan)." *Economics and Digital Business Review* 5, no. 1 (20224): 245–52.
- Yanti, P. M. L. K, and L. S Musmini. "Menerapkan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pamsimas Pada Bumdes Giri Artha." *Jurnal Akuntansi Profesi* 11, no. 1 (2020): 47–58. <https://doi.org/10.23887/jap.v11i1.26065>.